



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 telah ditetapkan Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas sistem Pengendalian Intern No: 60.B/LHP/XVIII.MDN/06/2020, Tanggal 26 Juni 2020 pada poin 4 huruf f, diperintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk merevisi kebijakan akuntansi terkait penambahan masa manfaat aset tetap yang berasal dari pekerjaan rehabilitasi sampai dengan 100% sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 AGOSTUS 2020


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 AGOSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TANGGAL
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK
 DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ATAS PERBAIKAN ASET TETAP

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT BESAR			
020201	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	3 5
020202	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	2 4
020203	ALAT BANTU	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	2 4
0203	ALAT ANGKUTAN			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4
020302	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1
020303	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 4 6
020304	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
020305	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	6 9 12

1	2	3	4	5
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 2 3
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>21% s.d 50% >50% s.d 100%	2 5
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
0207	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
020703	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 4 5
020704	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	5 7 9

1	2	3	4	5
0208	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
020802	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3
0209	ALAT LABORATORIUM			
020901	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 4 4
020902	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	5 7 8
020903	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	5 7 8
020904	ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 5 5
020905	RADIATION APPLICATION DAN NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 5 5
020906	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4
020907	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	5 7 8
020908	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI, KALIBRASI, DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 5 5
0210	ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1

1	2	3	4	5
021003	SENJATA SINAR	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 2
021004	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2
0211	KOMPUTER			
021101	KOMPUTER UNIT	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2
021102	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2
0212	ALAT EKSPLORASI			
021201	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 2 3
021202	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 5 5
0213	ALAT PENGEBORAN			
021301	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 6 7
021302	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
0214	ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
021401	SUMUR	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
021402	PRODUKSI	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
021402	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	5 7 8

1	2	3	4	5
0215	ALAT BANTU EKSPLORASI			
021501	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 6 7
021502	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	4 6 7
0216	ALAT KESELAMATAN KERJA			
021601	ALAT DETEKSI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 2 3
021602	ALAT PELINDUNG	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2
021603	ALAT SAR	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
021604	ALAT KERJA PENERBANG	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 4 6
0217	ALAT PERAGA			
021701	ALAT PERAGA LATIHAN DAN PERCONTOHAN	Renovasi	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2
0218	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
021801	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 4 4
0219	RAMBU-RAMBU			
021901	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4
021902	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 2 4
021903	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2

1	2	3	4	5
0220	PERALATAN OLAH RAGA			
022001	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d 100%	50
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 100%	15
0312	MONUMEN			
031201	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 100%	15
0313	BANGUNAN MENARA			
031301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 100%	15
0314	TUGU TITIK KONTROL/ PRASASTI			
031401	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 100%	15
0315	JALAN DAN JEMBATAN			
031501	JALAN	Renovasi	>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
031502	JEMBATAN	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 100%	15
0316	BANGUNAN AIR			
031601	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 100%	10
031602	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 100%	10
031603	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 100%	5
031604	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Renovasi	>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 100%	3
031605	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN TANAH	Renovasi	>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 100%	3

1	2	3	4	5
031606	BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
031607	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
04	GOLONGAN INSTALASI DAN JARINGAN			
0411	INSTALASI			
041101	INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	7 10
041102	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	7 10
041103	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	3 5
041104	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	3 5
041105	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
041106	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
041107	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	3 5
041108	INSTALASI GAS	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
041109	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	1 3
041110	INSTALASI LAIN	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	1 3
0412	JARINGAN			
041201	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	7 10
041202	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
041203	JARINGAN TELEPON	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	5 10
041204	JARINGAN GAS	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	7 10

1	2	3	4	5
041205	JARINGAN MUSIK MODERN/ BAND	Overhaul	>30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 2 2
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
0511	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
051101	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	>50% s.d 100%	2
051102	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	>30% s.d 45% >45% s.d 100%	10 15
051103	JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi/ Overhaul	>50% s.d 100%	5



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA